

Analisis Dampak Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua Melalui Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Per Kapita (Periode 2010-2021)

Verdi Payung Tappi^{*}, Mesak Ick^{**}, Hasan Basri Umar^{**}, dan Yundy Hafrizianda^{**}

^{*} Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

^{**} Dosen Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Cenderawasih

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 11 Desember 2025

Disetujui 16 Januari 2026

Keywords:

Belanja Langsung (BLG),
Belanja Tidak Langsung (BTL),
Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
Pendapatan Perkapita (YPK),
Kemiskinan (MSK)

ABSTRAK

Abstract : *The aim of the research is to determine the magnitude of the impact of direct spending and indirect spending on poverty in Papua province, both direct impacts and indirect impacts through economic growth and per capita income. Research data uses time series data for the 2010-2022 period. The research results show that the effect of direct spending on poverty is that the direct spending coefficient value in 29 districts/cities is -0.1147, meaning that if direct spending is increased by 1% in each district/city it will have an impact on reducing the poverty level by 0.1147% in each district/city in Papua province, the probability value is 0.0002 which is smaller than the significance level of 0.05 ($0.002 < 0.05$), looking at the interpretation results above it can be explained that the district/regional government Cities throughout Papua province are encouraged to increase direct spending because this endogenous variable has a significant impact on reducing poverty levels. The coefficient value of indirect spending on poverty is -0.048658, meaning that if indirect spending increases by 1% in each district/city, it will have an impact on reducing the poverty level by 0.048658% in each district/city. cities in Papua province with a probability level of $0.2960 > 0.05$, meaning that indirect spending has no significant effect on reducing poverty levels, this is because district/city regional governments focus more on indirect spending on buildings and structures, roads, irrigation and networks. The effect of direct expenditure on poverty through economic growth and per capita income is -0.2381, which means that if direct expenditure for each district/city is increased by 1%, then the average level of poverty that occurs in each district/city in Papua province will experience a decrease of 0.2381%. The effect of indirect spending on poverty through economic growth and per capita income is -0.0609, which means that if the indirect spending of each district/city is increased by 1%, then the average level of poverty that occurs in each district/city throughout Papua province will experience a decrease of 0.0609%*

Abstrak : Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya dampak belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan di provinsi Papua baik dampak secara langsung maupun dampak tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Data penelitian menggunakan data time series periode 2010-2022. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan didapatkan nilai koefisien belanja langsung pada 29 kabupaten/kota sebesar -0,1147 dalam artian bahwa jika belanja langsung dinaikkan sebesar 1 % di masing-masing kabupaten/kota maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,1147 % pada masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua, nilai probabilitas sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,002 < 0,05$), mencermati hasil interpretasi diatas maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se provinsi Papua didorong untuk meningkatkan belanja langsung sebab variabel endogen tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengaruh belanja tidak langsung terhadap kemiskinan didapatkan nilai koefisien sebesar -0,048658 dalam artian bahwa jika belanja tidak langsung naik sebesar 1 % di masing-masing kabupaten/kota maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,048658 % pada masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua dengan tingkat probabilitas sebesar $0,2960 > 0,05$ artinya bahwa belanja tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kabupaten/kota lebih memfokuskan belanja tidak langsung ke belanja Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengaruh belanja

langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar - 0,2381 yang berarti bahwa jika belanja langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1%, maka rata-rata tingkat kemiskinan yang terjadi pada masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua akan mengalami penurunan sebesar 0,2381%. Pengaruh belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar - 0,0609 yang berarti bahwa jika belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1%, maka rata-rata tingkat kemiskinan yang terjadi pada masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua akan mengalami penurunan sebesar 0,0609%.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Verdi Payung Tappi,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : verdipayung@gmail.com

Pendahuluan

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program, kegiatan, operasional dan merupakan bagian penting dari proses pengelolaan keuangan daerah yang merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengeluaran ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang mencakup berbagai jenis pengeluaran seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah serta belanja investasi dalam infrastruktur, pengeluaran belanja daerah haruslah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yang terjadi dalam suatu proses sebagai suatu gambaran perekonomian suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi provinsi Papua rata-rata per kabupaten/kota 5,34% sangat penting bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan, yang berimbas pada peningkatan pendapatan per kapita.

Kemiskinan masih merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah yang sampai saat ini belum terpecahkan, meskipun beraneka ragam teori telah berupaya mencari penjelasan mengapa terjadi proses kemiskinan, secara garis besar, kemiskinan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan alamiah (Nasution, 1996). Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan, baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga mencakup masalah aturan permainan yang diterapkan. Sedangkan kemiskinan alamiah lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Pada kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lemah/terbatas, peluang produksi relatif kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah.

Kemiskinan adalah masalah sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks, di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, berdasarkan data BPS Tahun 2024 data kemiskinan di provinsi Papua sebanyak 911.000 jiwa, Papua Pegunungan sebanyak 365.430 Jiwa, Papua Selatan sebanyak 92.200 jiwa dan Papua Tengah sebanyak 308.480 Jiwa.

Pemberian status khusus bagi Provinsi Papua, seperti pemberian otoritas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan alokasi penerimaan keuangan yang juga semakin besar dibandingkan periode-periode sebelumnya diharapkan dapat memberikan perubahan positif yang signifikan. Namun demikian, jika dicermati aspek normatif dalam Undang-undang tersebut, tetap saja akan memunculkan konsekuensi adanya peluang dan ancaman yang sama besarnya, karena disatu aspek akan semakin besar peluang bagi peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup rakyat Papua, akan tetapi pada saat yang sama dan pada aspek lain terbuka lebar pula ancaman penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik di Provinsi Papua (eksekutif dan

legislatif) bagi kepentingan kelompok dan golongan ini yang menjadi penghambat terciptanya percepatan penentasan kemiskinan menjadi terhambat. Perjalanan Otsus Papua periode pertama telah berakhir dan memasuki otonomi khusus Papua tahap kedua membuktikan munculnya konflik kontra produktif antara kelompok dan golongan dalam memperebutkan jabatan birokrasi dan legislatif serta penyalahgunaan dana—danapembangunan bagi kepentingan kelompok dan golongan dan cenderung mengabaikan aspek pelayanan terhadap kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan keuangan antara pemerintah pusat pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping danaperimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi diharapkan dapat dipergunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penggunaan dana tersebut sudah seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Belanja Operasi (belanja langsung) adalah belanja yang tidak berhubungan langsung dengan program dan kegiatan yang dijalankan atau dengan kata lain pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi (belanja langsung) meliputi: belanja Pegawai, belanja Barang, subsidi, hibah, bantuan Sosial.

Belanja Modal (belanja tidak langsung) adalah belanja yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan yang dijalankan atau pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.

Pemberlakuan status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang sudah memasuki jilid II, banyak pihak berharap agar pembangunan di Papua mengalami percepatan yang signifikan dan mampu mengejar ketertinggalannya di bandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, setelah 20 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus Papua jilid I, masih banyak kekurangan yang di temukan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus itu sendiri. Tujuan utama dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dalam rangka percepatan pembangunan di Papua belum dapat di realisasikan sepenuhnya. Hal ini tentunya mengundang pertanyaan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terutama masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Dana Otonomi Khusus yang besar sudah di kucurkan pemerintah pusat ke daerah dan kewenangan pengelolaannya sebagian besar sudah ada di tangan pemerintah daerah, tetapi apa yang salah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, bagaimana sebenarnya peran dan keterlibatan masyarakat Papua dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua lebih khusus di Provinsi Papua terkait kebijakan-kebijakan pemerintah kota untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan belanja daerah, khususnya belanja langsung yang langsung bersentuhan dengan program dan kegiatan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Papua..

Selain dana otonomi khusus kebijakan pemerintah daerah menggandeng swasta, dalam hal ini sebagai investor akan meningkatkan investasi di Provinsi Papua, hal tersebut akan berdampak secara langsung pada penerimaan anggaran dan secara luas terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan yang muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan kabupaten/kota melalui pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maka perlu dilaksanakan penetapan belanja prioritas pada bidang yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti: bidang kesehatan, bidang pendidikan, ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan tuntutan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Gambaran mengenai kondisi belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita Provinsi Papua yang menjadi acuan untuk mengukur tingkat kemiskinan sebagai indikator tingkat kesejahteraan rakyat yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, data awal yang merupakan hasil pengamatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, nampak bahwa penerimaan pemerintah Provinsi Papua dalam kurun waktu satu dasawarsa terus mengalami kenaikan dan seharusnya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang seimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah

merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, peranan strategis dari investasi pemerintah ini sasaran utamanya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah menuntut adanya suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah sendiri, dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan pada kondisi dan item tertentu saja, karena secara umum upaya tersebut justru dapat meningkatkan beban yang harus ditanggung masyarakat. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, kebijakan yang dituangkan dalam suatu perencanaan memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja tidak langsung karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya.

Penyebab kemiskinan di provinsi Papua sebagian ditentukan kondisi geografis Papua yang terdiri dari pegunungan, hutan lebat, dan wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi. Hal ini menghambat distribusi barang dan jasa serta akses masyarakat ke layanan dasar serta sebagian besar masyarakat Papua bergantung pada pertanian subsisten, perikanan, dan hutan untuk mata pencaharian mereka. Kurangnya diversifikasi ekonomi dan akses ke pasar yang lebih luas membatasi peluang pendapatan. Faktor-faktor sosial dan budaya termasuk adat istiadat dan struktur sosial tradisional sering kali mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kemiskinan berdampak langsung pada rendahnya kualitas hidup masyarakat Papua. Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, air bersih, dan sanitasi yang baik memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menghambat akses anak-anak Papua ke pendidikan yang layak, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Kemiskinan juga berdampak pada ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dan anak perempuan sering kali lebih rentan terhadap kekurangan gizi, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak belanja langsung terhadap kemiskinan pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua ?
2. Bagaimana dampak belanja tidak langsung terhadap kemiskinan pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua ?
3. Bagaimana dampak belanja langsung terhadap kemiskinan pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita ?
4. Bagaimana dampak belanja tidak langsung terhadap kemiskinan pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita ?

Kajian Teori

Teori Pengeluaran Pemerintah

Adolf Wagner dalam teorinya mengatakan bahwa semakin lama belanjayang dilakukan oleh pemerintah akan semakin meningkat. Pemikirannya ini didasarkan atas penelitian empiris yang dilakukannya pada negara-negara maju, seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat pada abad ke-19 serta didasarkan pada suatu teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang memandang pemerintah sebagai individu yang memiliki kuasa untuk bertindak bebas dari anggota masyarakat lainnya. Atas penelitian tersebut ia menemukan bahwa belanja pemerintah terus mengalami peningkatan terutama karena pemerintah harus mengatur kegiatan/hubungan/aktivitas yang ada dalam masyarakat (Idris, 2018). Hubungan-hubungan seperti pendidikan, kebudayaan, hukum, rekreasi, dan sebagainya merupakan kepentingan yang harus diatur oleh pemerintah, sebab di negara maju ketika terjadi kegagalan pasar, maka bisa saja kegagalan dari suatu industri menimpa industri lain yang saling berkaitan di negara tersebut. Selain itu meningkatnya belanja pemerintah juga disebabkan karena terjadinya urbanisasi, meningkatnya pendapatan masyarakat, tuntutan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, berkembangnya ekonomi dan demokrasi, serta ketidakefisienan birokrasi pemerintah (Dumairy, 1996).

Pendekatan Konsep Pengeluaran Pemerintah

Dalam tatanan makro pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y = C + I + G + (X - M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y sebagai variabel

dependen melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dumairy (dikutip oleh Diah Pradonowati, 2009) mengatakan bahwa dengan membandingkan nilai G terhadap Y , serta mengamatinnya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Pendekatan tentang Konsep Efisiensi, Efektivitas, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan kepada daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kawasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan. Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Todaro (1999) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Pembangunan atau belanja langsung, adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang non konsumtif, berbentuk investasi dalam proyek-proyek, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan bendungan air maupun non fisik seperti proyek-proyek dalam pengembangan pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Pelaksanaan belanja pembangunan dirinci ke dalam sektor-sektor tiap-tiap sektor dibagi ke dalam subsektor, masing-masing subsektor dirinci ke dalam program proyek, dan akhirnya untuk masing-masing proyek dirinci lagi ke dalam bagian anggaran (Hasan, 1994).

Pengeluaran pembangunan (belanja langsung) merupakan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dengan kata lain untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif, kriteria ini sekaligus berarti perluasan lapangan dan kesempatan kerja, Jadi pengeluaran pembangunan yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, kemudian indikator pengeluaran pembangunan dalam hal ini adalah berbagai proyek baik proyek fisik maupun proyek non fisik yang diprogramkan dalam setiap sektor maupun subsektor.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu: 1. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, 2. Adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode, 3. Adanya kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya, 4. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan $S = I = \Delta K$. Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian diinvestasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Jhingan, 2004). Solow menganggap output di dalam perekonomian sebagai suatu

keseluruhan, sebagai satu-satunya komoditi, dimana laju produksi tahunannya dinyatakan sebagai $Y(t)$ yang menggambarkan pendapatan nyata masyarakat, sebagian daripadanya dikonsumsi dan sisanya ditabung dan diinvestasikan, bagian yang ditabung S adalah konstan dan laju tabungan adalah $sY(t)$. $K(t)$ adalah stok modal, jadi investasi netto adalah laju kenaikan stok modal ini yaitu dk/dt atau K dengan demikian persamaan pokoknya adalah $K = sY$.

Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan *Harrod-Domar* ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu *Evsey Domar* dan *Sir Roy F. Harrod*. Teori *Harrod-Domar* ini mempunyai asumsi yaitu: 1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh, 2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, 3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol, 4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

Teori Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita bisa dijelaskan sebagai besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau daerah tertentu, dalam bahasa yang berbedadisebutkan bahwa pendapatan regional per kapita merupakan hasil daripendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan per kapita. Menurut Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno (Ekonomi Pembangunan: 2007) mengemukakan bahwa pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk di suatu daerah atau negara. Pendapatan perkapita digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.

Metode Perhitungan Pendapatan Per Kapita

Menurut teori Sollow Swan jika suatu negara menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke tabungan dan investasi maka negara itu akan memiliki ketersediaan modal steady state dan tingkat pendapatan yang tinggi, dan sebaliknya Sollow Swan juga memprediksi bahwa negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki PDB per kapita yang rendah. Sedangkan menurut Chabibah (Ensiklopedia Pendapatan Nasional: 2019) menyatakan bahwa ada 2 (dua) komponen penting dalam pembentukan pendapatan per kapita yaitu: 1. Pendapatan nasional, jika pendapatan nasional tinggi maka biasanya pendapatan per kapita juga tinggi. 2. Jumlah penduduk, jika jumlah penduduknya rendah maka biasanya pendapatan per kapitanya tinggi. Pendapatan perkapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu. Biasanya, dihitung setiap periode satu tahun, untuk mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatannasional dihitung dari jumlah seluruh pendapatan penduduk negara tersebut. Cara menghitung pendapatan per kapita adalah menjumlahkan pendapatanseluruh penduduk suatu negara pada tahun tertentu. Kemudian, dibagi dengan jumlah penduduk negara yang bersangkutan pada periode tahun yang sama. Jika di formulakan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{Pendapatan Nasional}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Teori Kemiskinan

Kritik utama terhadap teori Malthus dan Neo Malthusian, yaitu : 1). Teori itu tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuan teknologi. 2). Teori itu didasarkan pada suatu hipotesa tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan perkapita. 3). Teori itu merupakan perhatian kepada variabel yang keliru yaitu pendapatan perkapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk. Faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung : Tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja), tingkat inflasi, tingkat investasi, lokasi serta kualitas sumber daya alam, tingkat dan jenis pendidikan, etos kerja dan motivasi pekerja. Sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia ada tiga faktor penyebab utama antara lain : 1). tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja disektor tersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, kapital, dan teknologi terbatas serta tingkat pendidikan petani yang rata-ratanya sangat rendah. 2). daya saing petani atau dasar tukar domestik (*term of trade*) komoditi pertanian terhadap output industri semakin lemah. 3). tingkat diversifikasi usaha disektor pertanian ke jenis-jenis komoditi nonfood yang memiliki prospek pasar (terutama ekspor) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat sulit untuk disembuhkan. Kemiskinan mengakibatkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab orang menjadi miskin. Todaro dan Smith (1998:7) menyatakan keterbelakangan penduduk negara berkembang terutama disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang rendah, menyebabkan produktivitasnya rendah sehingga pendapatan rendah, hal ini mengakibatkan rendahnya standar kualitas hidup atau rendahnya tingkat hidup. Tingkat hidup yang rendah ditandai dengan (1) kemiskinan, (2) kesehatan yang buruk dan tidak memadai, dan (3) pendidikan dan layanan masyarakat yang rendah. Hal tersebut berakibat pada (1) penghargaan diri yang rendah dan (2) kebebasan yang terbatas. Todaro dan Smith (1988) menunjukkan adanya hubungan antara kemiskinan dengan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab kemiskinan masyarakat yaitu (1) rendahnya taraf hidup, (2) rendahnya rasa percaya diri, dan (3) terbatasnya kebebasan. Ketiga sebab tersebut memiliki hubungan timbal balik. Pilar utama kajian kemiskinan paling tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan budaya, ekonomi dan sosial. Perspektif budaya penduduk miskin yang hidup miskin adalah lebih mudah hidup tanpa pendapatan daripada harus bekerja keras memperoleh pendapatan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Perkapita

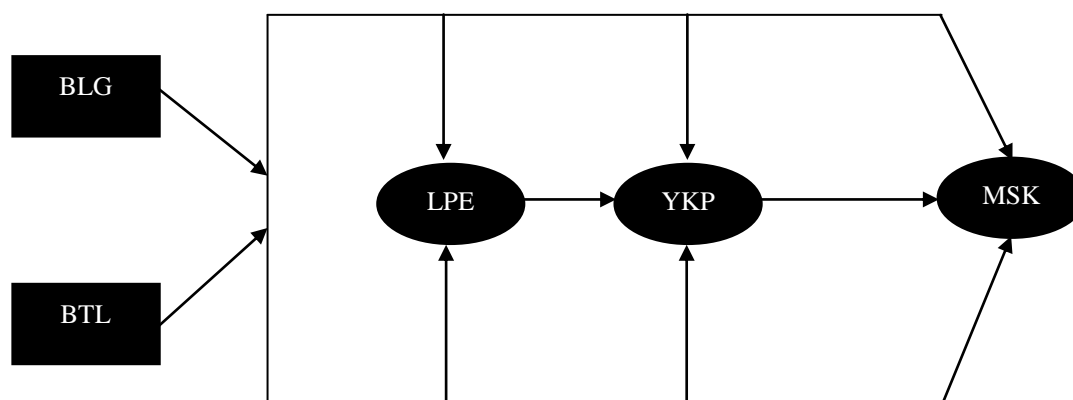
Menurut *Adam Smith dalam Joseph Stiglitz* Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita adalah dua konsep ekonomi yang saling terkait erat dan memiliki hubungan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana kedua konsep ini berhubungan yakni Kenaikan produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan peningkatan produk domestik bruto riil menunjukkan bahwa lebih banyak barang dan jasa diproduksi dalam perekonomian. Jika produk domestik bruto meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan meningkat. Dan Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, biasanya ada peningkatan dalam pendapatan individu dan rumah tangga. Ini berarti pendapatan per kapita akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Distribusi pendapatan, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan sebagian besar manfaat dari pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan menyediakan peluang ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan bagi kelompok masyarakat yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan manfaatnya terdistribusi secara merata di seluruh masyarakat. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita dalam pengentasan kemiskinan.

Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan

Menurut *Jeffrey Sachs*, Pendapatan per kapita dan kemiskinan adalah dua indikator ekonomi yang sangat terkait. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara pendapatan per kapita dan kemiskinan pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh per orang dalam suatu negara atau wilayah, dihitung dengan membagi total pendapatan nasional (PDB) dengan jumlah penduduk. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kemiskinan sering diukur dengan garis kemiskinan, yang merupakan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika pendapatan per kapita meningkat, secara umum masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya ekonomi yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena lebih banyak individu dan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Distribusi pendapatan penting untuk diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu berarti penurunan kemiskinan jika distribusi pendapatan tidak merata. Jika peningkatan pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok kecil yang sudah kaya, maka dampaknya terhadap kemiskinan akan terbatas. Jika pertumbuhan pendapatan per kapita disertai dengan kebijakan redistributif yang efektif, seperti pajak progresif dan program bantuan sosial, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan akan lebih signifikan. Pendidikan dan Pelatihan, Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan. Peningkatan Kualitas Hidup dengan meningkatnya pendapatan per kapita, masyarakat umumnya memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi kemiskinan. Pengurangan Ketimpangan peningkatan pendapatan per kapita yang disertai dengan kebijakan

yang mendorong pemerataan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kemiskinan.

Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

$$LPE_{kt} = a_0 + a_1 BL + a_2 BTL + e_1$$

$$YKP_{kt} = b_0 + b_1 LPE + b_2 BL + b_3 BTL + e_2$$

$$MSK_{kt} = c_0 + c_1 YKP + c_2 BL + c_3 BTL + e_3$$

$$a_1 > 0 ; a_2 > 0 ; b_1 > 0 ; b_2 > 0 ; b_3 > 0$$

$$c_1 < 0 ; c_2 < 0 ; c_3 < 0$$

Dimana :

BLG : Belanja Langsung

BTL : Belanja Tidak Langsung

LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi

YKP : Pendapatan Per Kapita

MSK : Kemiskinan

k : Wilayah ke “ k ” (29 kabupaten/kota)

t : Waktu ke “ t ” (time series : 2010 – 2021)

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis berkaitan dengan judul penelitian Analisis Dampak Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita periode 2010-2021 sebagai berikut:

1. Diduga bahwa belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 29 Kabupaten/kota di Provinsi Papua
2. Diduga bahwa belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 29 Kabupaten/kota di Provinsi Papua
3. Diduga bahwa belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada 29 Kabupaten/kota di Provinsi Papua melalui pendapatan perkapita;
4. Diduga bahwa belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada 29 Kabupaten/kota di Provinsi Papua melalui pendapatan perkapita.

Analisis Data

1. Dampak Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan berdasarkan Model Fish Form.

Tabel 1 Dampak Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Berdasarkan Model Fish Form

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keputusan
C*	-6.0692	1.7169	-3.5350	0.0005	Signifikan
BLG*	1.2664	0.1135	11.1545	0.0000	Signifikan
BTL*	0.3241	0.1495	2.1675	0.0309	Signifikan
R-squared = 0.4080; F-Stat = 108.90 (0,0000) ; DW-stat = 0.1037					
1) Dependent Variabel : PDRB*					
C*	10.2157	1.0179	10.0357	0.0000	Signifikan

PDRB*	0.7744	0.0328	23.6295	0.0000	Signifikan
BLG*	-0.6915	0.0780	-8.8680	0.0000	Tidak Sesuai Teori
BTL*	0.3375	0.0876	3.8530	0.0001	Signifikan
R-squared = 0.6892; F-Stat = 228.38 (0,0000) ; DW-stat = 0.1271					
2) Dependent Variabel : YKP*					
C*	10.2972	0.5292	19.4577	0.0000	Signifikan
YKP*	-0.2966	0.0177	-16.7290	0.0000	Signifikan
BLG*	-0.0970	0.0348	-2.7905	0.0056	Signifikan
BTL*	-0.0487	0.0465	-1.0468	0.2960	Non Signifikan
R-squared = 0.5578; F-Stat = 129.33 (0,0000) ; DW-stat = 0.0840					
3) Dependent Variabel : MSK*					

* data log natural

Berdasarkan tabel 5.30 diatas pada bagian pertama dapat dijelaskan bahwa persamaan garis regresi didapat nilai sebesar $LPE_{kt} = -6,069217 + 1,266395BLG + 0,324093BTL$ dengan interpretasi bahwa jika diasumsikan belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 6,069217 persen. Nilai koefisien belanja langsung sebesar 1,266395 dalam artian bahwa jika belanja langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1 % maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 1,27 % sedangkan koefisien belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota sebesar 0,324093 dalam artian bahwa jika belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1 % maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 0,32 %.

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur belanja langsung dan belanja tidak langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan, berarti pemerintah daerah lebih mengutamakan kedua variabel tersebut, hal ini ditunjukkan nilai koefisien determinasi atau $R. Squared(R^2)$ yang masing-masing mencapai 0.4080 yang berarti bahwa variabel endogen yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat menjelaskan 40,80 persen terhadap variabel eksogenya sedangkan sisanya 59,20 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan.

Nilai F-statistik sebesar 108,90 nilai ini lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 1,70 dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara kedua variabel eksogen dengan Kesimpulan bahwa hipotesis diterima, sedangkan nilai DW-Statistik = 0,1037 lebih kecil dari DU Statistik 2,3007 dengan Kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data penelitian, mencermati hasil interpretasi diatas maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se provinsi Papua didorong untuk meningkatkan belanja langsung sebab belanja langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap terhadap pembentukan laju pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota yang ada.

Berdasarkan tabel 5.30 diatas pada bagian kedua dapat dijelaskan bahwa persamaan garis regresi didapat nilai sebesar $YKP_{kt} = 10,2157 + 0,7744LPE - 0,6915BLG + 0,3375BTL$ dengan interpretasi bahwa jika diasumsikan variabel pertumbuhan ekonomi, variabel belanja langsung maupun variabel belanja tidak langsung pada 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka pendapatan perkapita sebesar 10,2157 persen. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7744 dalam artian bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1 % maka akan berdampak atau berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita sebesar 0,7744%. Nilai koefisien belanja langsung sebesar -0,6915 dalam artian bahwa jika belanja langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1 % maka akan berdampak pada penurunan pendapatan perkapita masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 0,6915%, sedangkan koefisien belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota sebesar 0,3375 dalam artian bahwa jika belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1 % maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 0,3375 %.

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi dan belanja tidak langsung berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, berarti pemerintah daerah lebih mengutamakan kedua variabel tersebut, dibandingkan dengan belanja langsung sebab dalam penelitian ini belanja langsung berdampak negatif terhadap pendapatan perkapita akan tetapi secara simultan yang ditunjukkan nilai koefisien determinasi atau $R. Squared (R^2)$ yang masing-masing mencapai 0.6892 yang berarti bahwa variabel endogen yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat menjelaskan 68,92% terhadap variabel eksogenya sedangkan sisanya 31,08 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan.

Nilai F-statistik sebesar 228,38 nilai ini lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 4,12 (F-statistik > F-tabel) dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara variabel eksogen dengan variabel endogen,

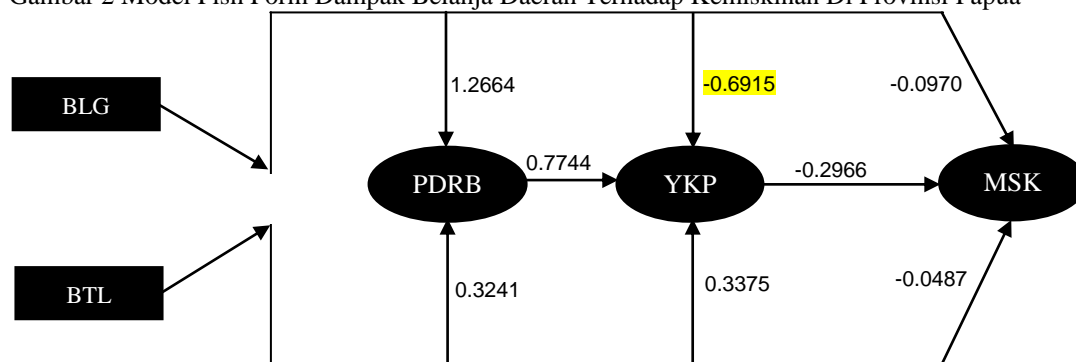
dengan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, sedangkan nilai DW-Statistik = 0,1271 lebih kecil dari DU Statistik 1,8718 dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data penelitian, mencermati hasil interpretasi diatas maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se provinsi Papua didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, belanja langsung dan belanja tidak langsung sebab ketiga variabel tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap terhadap peningkatan pendapatan perkapita di setiap kabupaten/kota yang ada.

Berdasarkan tabel 5.30 diatas pada bagian ketiga dapat dijelaskan bahwa persamaan garis regresi didapat nilai sebesar $MSK_{kt} = 10,2972 - 0,2966YKP - 0,0970BLG - 0,0487BTL$ dengan interpretasi bahwa jika diasumsikan variabel pendapatan perkapita, variabel belanja langsung maupun variabel belanja tidak langsung pada 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 10,2972%. Nilai koefisien pendapatan perkapita sebesar - 0,2966 dalam artian bahwa jika pendapatan perkapita mengalami peningkatan 1% di setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua maka akan berdampak atau berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,297%. Nilai koefisien belanja langsung sebesar -0,0970 dalam artian bahwa jika belanja langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1% maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 0,0970%, sedangkan koefisien belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota sebesar -0,0487 dalam artian bahwa jika belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua dinaikkan 1 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 0,0487%.

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pendapatan perkapita, belanja langsung dan belanja tidak langsung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, berarti pemerintah daerah lebih mendorong ketiga variabel tersebut, untuk ditingkatkan setiap tahun anggaran sebab dalam penelitian ini ketiga variabel tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang ditunjukkan secara simultan dengan nilai koefisien determinasi atau R^2 yang masing-masing mencapai 0.5578 yang berarti bahwa variabel endogen (pendapatan perkapita, belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat menjelaskan 55,78% terhadap variabel eksogenya (tingkat kemiskinan) sedangkan sisanya 44,22 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan dalam penelitian ini.

F-statistik adalah untuk menentukan apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel eksogen yang signifikan terhadap variabel endogen yang didasarkan pada perbandingan variansi antar kelompok variabel eksogen dengan variansi dalam variabel endogen, nilai F-statistik sebesar 129,33 nilai ini lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 4,12 ($129,33 > 4,12$) dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara variabel eksogen dengan variabel endogen, dengan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, sedangkan nilai DW-Statistik = 0,0840 lebih kecil dari DU-statistik 1,8718 ($0,0840 < 1,8718$) dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data penelitian, mencermati hasil interpretasi diatas maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se provinsi Papua didorong untuk meningkatkan pendapatan perkapita, belanja langsung dan belanja tidak langsung sebab ketiga variabel tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota yang ada. Kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan sehingga angka kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi Papua mampu dikurangi. Pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif, selain kemampuan intervensi lainnya dari pemerintah. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah melalui alokasi belanjanya.

Gambar 2 Model Fish Form Dampak Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua



Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya pengaruh langsung belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2664 dan besarnya pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3241. Besarnya pengaruh langsung belanja langsung terhadap pendapatan perkapita sebesar -0,6915 dan besarnya pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap pendapatan perkapita sebesar 0,3375. Pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan sebesar -0,0970 dan pengaruh belanja tidak langsung terhadap kemiskinan sebesar -0,0487. Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan perkapita sebesar 0,7744 dan pengaruh langsung pendapatan perkapita terhadap kemiskinan sebesar -0,2966.

Tabel 2 Dampak Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Berdasarkan Fish Form

Variabel	Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pendapatan Perkapita (YKP)
BLG	1,2664	2,0404
BLT	0,3241	1,0981

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2664 sedangkan pengaruh tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3241 atau lebih kecil dari pengaruh belanja langsung, pengaruh belanja langsung terhadap pendapatan perkapita melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0440 dan pengaruh belanja tidak langsung terhadap pendapatan perkapita melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 1,0981.

Tabel 3 Dampak Total Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Berdasarkan Model Fish Form

Variabel	Dampak Langsung Ke MSK	Dampak Tidak Langsung		Dampak Total
		YKP → MSK	PDRB → YKP → MSK	
BLG	-0.0970	0.2051	-0.2909	-0.1828
BLT	-0.0487	-0.1001	-0.0744	-0.2232

Berdasarkan tabel 5.32 diatas dapat dijelaskan bahwa dampak langsung belanja langsung (X_1) terhadap kemiskinan (Y_3) sebesar -0,0970 yang artinya bahwa jika belanja langsung dinaikkan 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0970%, dampak tidak langsung belanja langsung terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita sebesar 0,2015 artinya bahwa belanja langsung tidak bisa memberikan dampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebab pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak digunakan untuk usaha-usaha produktif akan tetapi lebih pola hidup masyarakat lebih konsumtif. Dampak belanja langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar -0,2909 artinya bahwa jika belanja langsung di naikkan 1% akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,2909 sebab pendapatan yang diterima masyarakat digunakan untuk usaha-usaha produktif sehingga dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan dampak total belanja langsung terhadap kemiskinan sebesar -0,1828.

Merujuk pada tabel 5.32 diatas dapat dijelaskan bahwa dampak langsung belanja tidak langsung (X_2) terhadap kemiskinan (Y_3) sebesar -0,0487 yang artinya bahwa jika belanja tidak langsung dinaikkan 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0487%, dampak tidak langsung belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita sebesar -0,1001 artinya bahwa jika belanja tidak langsung dinaikkan 1% akan memberikan dampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,1001%. Dampak belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar -0,0744 artinya bahwa jika belanja langsung di naikkan 1% akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0744% sebab pendapatan yang diterima masyarakat digunakan untuk usaha-usaha produktif sehingga dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan dampak total belanja tidak langsung terhadap kemiskinan sebesar -0,2232.

Pengembangan Model Fish Form Berdasarkan Model Trimming

Model Trimming adalah model yang digunakan untuk memperbaiki suatu model struktural yang terbentuk dalam sistem persamaan dengan cara mengeluarkan dari model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan, dan tidak sesuai dengan teori. Jadi, model trimming diterapkan ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan ternyata ada variabel yang tidak signifikan dan atau tidak sesuai teori. Walaupun ada satu, dua, atau lebih variabel yang tidak signifikan, peneliti perlu memperbaiki model struktur jalur yang telah dihipotesiskan, agar seluruhnya signifikan dan sesuai teori, sehingga dapat digunakan dengan sempurna untuk melakukan simulasi kebijakan. Cara menggunakan model trimming dalam pengembangan

model Fish Form ini yaitu menghitung ulang koefisien tanpa menyertakan variabel eksogen yang koefisiennya tidak signifikan dan atau tidak sesuai teori. Dan ini dilakukan terus menerus, hingga diperoleh model Fish Form yang signifikan secara statistik dan dapat diterima secara teori. Hasilnya, setelah dilakukan 2 (dua) kali iterasi, diperoleh model Fish Form yang final sebagai berikut.

Tabel 4 Dampak Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Berdasarkan Model Fish Form Setelah Dilakukan Model Trimming

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keputusan
C*	-6.0692	1.7169	-3.5350	0.0005	Signifikan
BLG*	1.2664	0.1135	11.1545	0.0000	Signifikan
BTL*	0.3241	0.1495	2.1675	0.0309	Signifikan
1) Dependent Variable : PDRB*					
C	7.8741	0.4132	19.0556	0.0000	Signifikan
PDRB*	0.6251	0.0281	22.2429	0.0000	Signifikan
2) Dependent Variable : YKP*					
C*	9.9551	0.4163	23.9141	0.0000	Signifikan
YKP*	-0.3008	0.0173	-17.4055	0.0000	Signifikan
BLG*	-0.1147	0.0304	-3.7678	0.0002	Signifikan
3) Dependent Variable : MSK*					

* Data log natural

Berdasarkan tabel 5.33 setelah dilakukan model trimming sebagai dampak dari adanya variabel eksogen yang tidak signifikan dan tidak sesuai dengan teori maka pada bagian pertama masih tetap sama sebelum dilakukan model trimming karena semua variabel eksogen sesuai dengan teori dan signifikan sehingga dapat dijelaskan bahwa persamaan garis regresi didapat nilai sebesar $LPE_{kt} = -6,069217 + 1,266395BLG + 0,324093BTL$ dengan interpretasi bahwa jika diasumsikan belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 6,069217 persen. Nilai koefisien belanja langsung sebesar 1,266395 dalam artian bahwa jika belanja langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1 % maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 1,27 % sedangkan koefisien belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota sebesar 0,324093 dalam artian bahwa jika belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1 % maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 0,32 % .*Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Esra Kaligis (2017) dengan judul Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Minahasa Utara Melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai intervening variabel, dengan hasil belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0,561. Sedangkan pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan negatif dan signifikan koefisien -0,207. Pengaruh tidak langsung $(-0.207 \times 0.561) = -0.116$.*

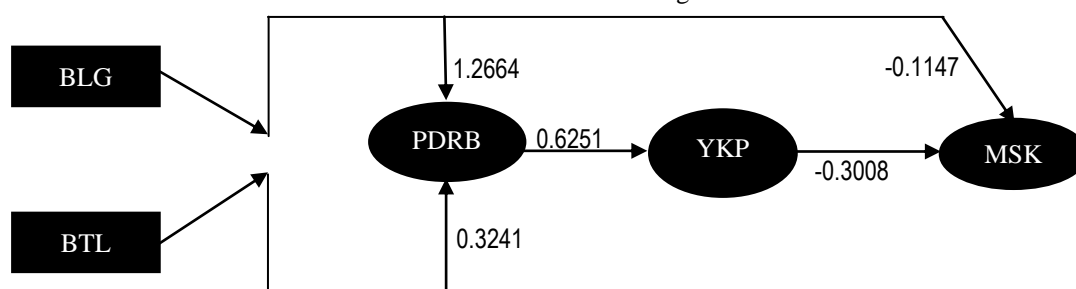
Berdasarkan tabel 5.33 setelah dilakukan model trimming maka pada bagian kedua dapat dijelaskan bahwa persamaan koefisien jalur didapat nilai sebesar $YKP_{kt} = 7,8741 + 0,6251LPE$ dengan interpretasi bahwa jika diasumsikan variabel pertumbuhan ekonomi atau PDRB pada 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka pendapatan perkapita sebesar 7,8741. Nilai koefisien jalur pertumbuhan ekonomi sebesar 0,6251 dalam artian bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1% maka akan berdampak atau berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita sebesar 0,6251. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, berarti pemerintah daerah lebih mengutamakan untuk terus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, dibandingkan dengan variabel lain, sesuai dengan penelitian Jamaludin dan Hijri Juliansya (2020) dengan judul *Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pendapatan Perkapita Indonesia dengan hasil pengujian yang dilakukan terdapat pada Tabel 12 di atas maka dapat diketahuinya bahwasanya nilai F-statistik sebesar 396.8590 pada taraf kepercayaan 5%, sementara F-tabel $V1=n-k$ ($29-3=26$) dan $V2=k-1$ ($3-1=2$) di peroleh nilai sebesar 3,37 maka F-statistik > F-tabel yaitu $396.8590 > 3,37$. Kesimpulan hipotesis adalah terima H_a yang berarti belanja daerah berpengaruhnya signifikan kepada pendapatan per kapita penduduk di Indonesia.*

Berdasarkan tabel 5.33 diatas setelah dilakukan model trimming pada bagian ketiga dapat dijelaskan bahwa persamaan koefisien jalur didapat nilai sebesar $MSK_{kt} = 9,9551 - 0,3008YKP - 0,1147BLG$ dengan interpretasi bahwa jika diasumsikan variabel pendapatan perkapita, variabel belanja langsung pada 29 kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 9,9551, nilai koefisien pendapatan perkapita sebesar -0,3008 dalam artian bahwa jika pendapatan perkapita mengalami peningkatan 1% di setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua maka akan berdampak atau berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,3008%.

Nilai koefisien belanja langsung sebesar -0,1147 dalam artian bahwa jika belanja langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikkan 1% maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan masing-masing kabupaten/kota se provinsi Papua sebesar 0,1147%. *Didukung oleh penelitian Ahmad Zakaria (2016) dengan pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan dan kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan hasil belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kelima bahwa variabel belanja daerah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan signifikan dan negatif melalui pembangunan sosial. Hasil pengaruh tidak langsung dapat ditunjukkan dari perkalian sebesar $(0,128) \times (-0,870) = -0,111$.*

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pendapatan perkapita, belanja langsung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, berarti pemerintah daerah lebih mendorong variabel tersebut, untuk ditingkatkan setiap tahun anggaran sebab dalam penelitian ini variabel tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi Papua.

Gambar 3 Model Fish Form Dampak Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua Setelah Dilakukan Model Trimming



Berdasarkan gambar 3 dampak belanja daerah terhadap kemiskinan di provinsi Papua setelah dilakukan model trimming didapatkan hasil bahwa pengaruh langsung belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,2664 dan pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3241, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan perkapita sebesar 0,6251 dan pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan sebesar -0,3008 dan pengaruh langsung belanja langsung terhadap tingkat kemiskinan sebesar -0,1147 sedangkan pengaruh langsung belanja tidak tidak dalam gambar karena setelah menggunakan model trimming variabel yang tidak signifikan dan atau tidak sesuai dengan teori maka akan dihilangkan dari koefisien jalur.

Tabel 5 Dampak Total Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Berdasarkan Model Fish Form Setelah Dilakukan Model Trimming

Variabel	Pengaruh Langsung Ke MSK	Pengaruh Tidak Langsung		Pengaruh Total
		YKP→MSK	PDRB→YKP→MSK	
BLG	-0.1147	-	-0.2381	-0.3528
BLT	-	-	-0.0609	-0.0609

Berdasarkan tabel 5.34 diatas dapat dijelaskan pengaruh langsung belanja langsung terhadap kemiskinan sebesar -0,1147 artinya bahwa jika belanja langsung dinaikkan 1% akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskiiinan sebesar 0,1147%, pengaruh tidak langsung belanja langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar -0,2381 artinya bahwa jika ketiga variabel eksogen tersebut dinaikan masing-masing 1% maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,2381%, atau pengaruh total dari variabel eksogen terhadap variabel endogen sebesar 0,3528%, sedangkan pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap kemiskinan tidak ada setelah menggunakan model trimming, pengaruh tidak langsung belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar -0,0609 artinya bahwa jika ketiga variabel eksogen tersebut dinaikan masing-masing 1% maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,0609%.

Penurunan Reduced Form Pada Model Fish Form

Reduced form dalam persamaan simultan adalah sebuah representasi dari model persamaan simultan di mana setiap variabel endogen (variabel yang dijelaskan oleh model) diekspresikan hanya sebagai fungsi dari variabel eksogen (variabel yang tidak dijelaskan oleh model) dan error term.

Reduced form memungkinkan kita menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dengan melihat koefisien dalam *Reduced form*, dapat dipahami bagaimana perubahan pada satu variabel eksogen mempengaruhi semua variabel endogen dalam sistem. *Reduced form* ini juga sangat penting dalam estimasi parameter model persamaan simultan. Metode

estimasi Two-Stage Least Squares (2SLS) bergantung pada bentuk reduksi untuk mendapatkan estimasi yang konsisten dan tidak bias.

Berikut ini adalah *reduced form* dari Model Fish Form yang sudah signifikan secara statistik dan sesuai dengan teori.

$$\text{LPEkt} = a_0 + a_1 \text{BLGkt} + a_2 \text{BTLkt} + e_1 \quad (1)$$

$$\text{YKPkt} = b_0 + b_1 \text{LPEkt} + e_2 \quad (2)$$

$$\text{MSKkt} = c_0 + c_1 \text{YKPkt} + c_2 \text{BLGkt} + e_3 \quad (3)$$

Masukan persamaan (1) ke (2)

$$\text{YKPkt} = b_0 + b_1 (a_0 + a_1 \text{BLGkt} + a_2 \text{BTLkt})$$

$$\text{YKPkt} = b_0 + b_1.a_0 + b_1.a_1 \text{BLGkt} + b_1.a_2 \text{BTLkt} \quad (4)$$

Masukan persamaan (4) ke (3) :

$$\text{MSKkt} = c_0 + c_1 (b_0 + b_1.a_0 + b_1.a_1 \text{BLGkt} + b_1.a_2 \text{BTLkt}) + c_2 \text{BLGkt}$$

$$\text{MSKkt} = c_0 + c_1.b_0 + c_1.b_1.a_0 + c_1.b_1.a_1 \text{BLGkt} + c_1.b_1.a_2 \text{BTLkt} + c_2 \text{BLGkt}$$

$$\text{MSKkt} = d_0 + c_1.b_1.a_1 \text{BLGkt} + c_2 \text{BLGkt} + c_1.b_1.a_2 \text{BTLkt}$$

$$\text{MSKkt} = d_0 + (c_1.b_1.a_1 + c_2) \text{BLGkt} + c_1.b_1.a_2 \text{BTLkt}$$

$$\text{MSKkt} = d_0 + d_1 \text{BLGkt} + d_2 \text{BTLkt} \quad (5)$$

Dimana :

$$d_0 = c_0 + c_1.b_0 + c_1.b_1.a_0$$

$$d_1 = c_1.b_1.a_1 + c_2$$

$$d_2 = c_1.b_1.a_2$$

Oleh karena diketahui :

$$a_0 = -6.0692 ; a_1 = 1.2664 ; a_2 = 0.3241 ; b_0 = 7.8741 ; b_1 = 0.6251$$

$$c_0 = 9.9551 ; c_1 = -0.3008 ; c_2 = -0.1147$$

maka :

$$d_0 = c_0 + c_1.b_0 + c_1.b_1.a_0$$

$$d_0 = 9.9551 + (-0.3008 \times 7.8741) + (-0.3008 \times 0.6251 \times -6.0692) = 8.7278$$

$$d_1 = c_1.b_1.a_1 + c_2$$

$$d_1 = (-0.3008 \times 0.6251 \times 1.2664) + -0.1147 = -0.3528$$

$$d_2 = c_1.b_1.a_2$$

$$d_2 = -0.3008 \times 0.6251 \times 0.3241 = -0.0609$$

Dengan demikian persamaan *reduced form* dampak belanja daerah terhadap kemiskinan melalui induksi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita adalah :

$$\text{MSK}_{kt} = 8.7278 - 0.3528 \text{BLG}_{kt} - 0.0609 \text{BTL}_{kt} \quad (11)$$

Berarti dampak total dari belanja daerah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita adalah :

1. Nilai konstanta menunjukkan bahwa jika belanja daerah tidak mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 8,73%
2. Dampak total belanja langsung (BLG) adalah -0.3528, yang artinya jika belanja langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikan 1%, maka rata-rata tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota se Papua akan turun sebesar 0,3528 %.
3. Dampak total Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah -0.0609, yang artinya jika belanja tidak langsung masing-masing kabupaten/kota dinaikan 1%, maka rata-rata tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota se Papua akan turun sebesar 0.0609 %.

Simulasi Kebijakan Berdasarkan Model Fish Form

Simulasi Kebijakan Untuk Rata-Rata Provinsi

Skenario kebijakan perlu dilakukan untuk memberikan kepastian dimasa depan tentang kondisi terjadi saat sekarang dengan memungkinkan perbandingan langsung dari berbagai opsi kebijakan dalam kondisi yang sama untuk membantu pengambil keputusan guna memilih kebijakan yang paling efektif, efisien, atau sesuai prioritas strategis serta mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dari kebijakan tertentu dan mencari peluang yang mungkin tidak dijelaskan dalam penelitian serta mensimulasikan berbagai skenario, memberikan masukan yang lebih akurat kepada para pengambil kebijakan.

Tabel 6 Simulasi Kebijakan Dampak Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Berdasarkan Model Fish Form

Skenario	Data Value (rata-rata seluruh daerah)		Simulasi Kebijakan Berdasarkan Reduced Form $\text{MSK}_{kt} = 8.7278 - 0.3528 \text{BLG}_{kt} - 0.0609 \text{BTL}_{kt}$							Perubahan dari baseline (%)
	BLG	BTL	a0	a1	a2	Ln BLG	Ln BTL	Ln MSK	Anti Ln (MSK)	
Baseline 2021	589,180.28	634,056.08	8.7278	-0.3528	-0.0609	13.2865	13.3599	3.23	25.20	

Sken 1 : Naik 5% (BLG & BTL)	618,639.29	665,758.88	8.7278	-0.3528	-0.0609	13.3353	13.4087	3.21	24.69	-0.50
Sken 2 : Naik 5% BLG	618,639.29	634,056.08	8.7278	-0.3528	-0.0609	13.3353	13.3599	3.21	24.77	-0.43
Sken 3 : Naik 5% BTL	589,180.28	665,758.88	8.7278	-0.3528	-0.0609	13.2865	13.4087	3.22	25.12	-0.07
Sken 4 : Naik 10% (BLG & BTL)	648,098.30	697,461.69	8.7278	-0.3528	-0.0609	13.3818	13.4552	3.19	24.22	-0.97
Sken 5 : Naik 10% BLG & 5% BTL	648,098.30	634,056.08	8.7278	-0.3528	-0.0609	13.3818	13.3599	3.19	24.36	-0.83
Sken 6 : Naik 5% BLG & 10% BTL	618,639.29	697,461.69	8.7278	-0.3528	-0.0609	13.3353	13.4552	3.20	24.62	-0.57

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung sebesar Rp. 589.180,28 dan belanja tidak langsung sebesar 634.056,08. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5% sehingga belanja langsung menjadi 618.639,29 dan belanja tidak langsung menjadi 665.758,88 nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Papua dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 25,20 %, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 24,69 % atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50 % dari baseline.

Skenario kedua belanja langsung tetap sebesar 618.639,29 tingkat kemiskinan sebesar 24,77% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,43% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga belanja tidak langsung dinaikkan 5% menjadi 589.180,28 tingkat kemiskinan sebesar 25,12% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07% dari baseline,

Skenario keempat belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikkan 10%, sehingga belanja langsung menjadi 648.098,30 dan belanja tidak langsung menjadi 697.461,69 tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 24,22% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07% dari baseline.

Untuk skenario kelima belanja langsung dinaikkan 10%, sehingga belanja langsung menjadi 648.098,30 dan belanja tidak langsung dinaikan 5% menjadi 634.056,08 tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 24,36% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,83% dari baseline. Dan untuk skenario keenam belanja langsung dinaikkan 5%, sehingga belanja langsung menjadi 618.639,29 dan belanja tidak langsung dinaikan 10% menjadi 697.461,69 tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 24,62% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,57% dari baseline, maka kesimpulan adalah jika pemerintah provinsi Papua menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,01 %.

Simulasi Kebijakan Untuk Kabupaten/Kota

Pada simulasi kebijakan kabupaten/kota hanya diterapkan pada 3 (tiga) skenario, yaitu Skenario 1, Skenario 2 dan Skenario 3, dengan pertimbangan bahwa simulasi kebijakan ini sifatnya prediktif dan teoritis yang dilakukan untuk mengamati respon dari setiap kabupaten/kota ketika diskenariokan belanja daerahnya masing-masing dinaikan, selain itu juga bila memasukkan seluruh skenario kebijakan (6 skenario) pada setiap kabupaten/kota maka akan terlihat kompleks pembahasannya, padahal substansinya sama. Berikut ini hasil simulasi kebijakan untuk masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 7 Simulasi Kebijakan Untuk Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Skenario Kebijakan				Perubahan dari Baseline (turun %)		
	Baseline	Sken 1	Sken 2	Sken 3	Sken 1	Sken 2	Sken 3
Rata-Rata Papua	25,20	24,69	24,77	25,12	0,50	0,43	0,07
Kab. Asmat	24,89	24,39	24,46	24,82	0,50	0,42	0,07
Kab. Biak Numfor	25,88	25,36	25,44	25,80	0,52	0,44	0,08
Kab. Boven Digoel	24,31	23,82	23,89	24,23	0,49	0,41	0,07
Kab. Deiyai	29,17	28,59	28,67	29,09	0,58	0,50	0,09
Kab. Dogiyai	29,25	28,67	28,76	29,17	0,58	0,50	0,09
Kab. Intan Jaya	26,54	26,01	26,09	26,46	0,53	0,45	0,08
Kab. Jayapura	23,86	23,38	23,45	23,79	0,48	0,41	0,07
Kab. Jayawijaya	24,56	24,07	24,14	24,49	0,49	0,42	0,07
Kab. Keerom	32,23	31,59	31,68	32,14	0,64	0,55	0,10
Kab. Kepulauan Yapen	29,23	28,65	28,73	29,14	0,58	0,50	0,09
Kab. Lanny Jaya	25,44	24,93	25,01	25,37	0,51	0,43	0,08
Kab. Mamberamo Raya	29,43	28,85	28,93	29,35	0,59	0,50	0,09
Kab. Mamberamo Tengah	27,11	26,57	26,65	27,03	0,54	0,46	0,08
Kab. Mappi	24,95	24,46	24,53	24,88	0,50	0,43	0,07
Kab. Merauke	22,30	21,85	21,92	22,23	0,45	0,38	0,07
Kab. Mimika	15,02	14,72	14,76	14,97	0,30	0,26	0,04

Kabupaten/Kota	Skenario Kebijakan				Perubahan dari Baseline (turun %)		
	Baseline	Sken 1	Sken 2	Sken 3	Sken 1	Sken 2	Sken 3
Kab. Nabire	26,71	26,18	26,25	26,63	0,53	0,46	0,08
Kab. Nduga	27,25	26,71	26,79	27,17	0,54	0,47	0,08
Kab. Paniai	26,21	25,69	25,77	26,13	0,52	0,45	0,08
Kab. Pegunungan Bintang	24,02	23,54	23,61	23,94	0,48	0,41	0,07
Kab. Puncak	25,78	25,26	25,34	25,70	0,52	0,44	0,08
Kab. Puncak Jaya	26,79	26,26	26,34	26,72	0,54	0,46	0,08
Kab. Sarmi	26,32	25,79	25,87	26,24	0,53	0,45	0,08
Kab. Supiori	32,36	31,71	31,81	32,26	0,65	0,55	0,10
Kab. Tolikara	23,26	22,79	22,86	23,19	0,46	0,40	0,07
Kab. Waropen	30,07	29,47	29,55	29,98	0,60	0,51	0,09
Kab. Yahukimo	25,32	24,82	24,89	25,25	0,51	0,43	0,08
Kab. Yalimo	28,52	27,95	28,03	28,44	0,57	0,49	0,08
Kota Jayapura	24,09	23,61	23,68	24,02	0,48	0,41	0,07

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung sebesar Rp. 589.180,28 dan belanja tidak langsung sebesar 634.056,08. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Papua dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 25,20 %, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 24,69 % atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50 % dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 24,77% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,43% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 25,12% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah provinsi Papua menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,01 %.

Kabupaten Asmat, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Asmat sebesar Rp. 592.593,25 dan belanja tidak langsung sebesar 750.081,18. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Asmat dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 25,20 %, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 24,69 % atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50 % dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 24,77% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,43% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 25,12% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah kabupaten Asmat menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,00 %.

Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 535.367,15 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 711.830,08. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Biak Numfor dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 25,88 %, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 25,36 % atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,52 % dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 25,44% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,44% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 25,80% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,04 %.

Kabupaten Boven Digoel, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 674.853,08 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 521.257,28. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Boven Digoel dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 24,31%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 23,82% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,49 % dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 23,89% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 29,09% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Boven Digoel menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,97 %.

Kabupaten Deiyai, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Deiyai sebesar Rp. 421.450,68 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 398.457,05. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Deiyai dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 29,17%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 28,59% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,58 % dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 28,67% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 29,09% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,09%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Deiyai menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,17 %.

Kabupaten Dogiyai, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Dogiyai sebesar Rp. 414.643,08 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 418.014,70. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Dogiyai dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 29,25%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 28,67% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,58 % dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 28,76% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 29,17% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,09%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Dogiyai menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,17 %.

Kabupaten Intan Jaya, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Intan Jaya sebesar Rp. 522.423,81 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 542.826,03. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Intan Jaya dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 26,54%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 26,01% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,53% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 26,09% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,45% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 26,46% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Intan Jaya menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,06 %.

Kabupaten Jayapura, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Jayapura sebesar Rp. 690.972,85 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 615.881,21. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Jayapura dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 23,86%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 23,38% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,48% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 23,45% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,41% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 23,79% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Jayapura menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,95 %.

Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 618.117,02 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 730.850,94. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Jayawijaya dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 24,56%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 24,07% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,49% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 24,14% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,42% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 24,49% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Jayawijaya menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,98 %.

Kabupaten Keerom, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Keerom sebesar Rp. 304.455,98 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 509.043,09. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Keerom dimana pada

baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 32,23%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 31,59% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,64% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 31,59% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,55% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 31,68% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,10%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Keerom menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,29 %.

Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp. 407.864,16 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 465.983,60. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Kepulauan Yapen dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 29,23%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 28,65% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,58% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 28,73% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 29,14% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,09%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,17 %.

Kabupaten Lanny Jaya, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp. 561.648,84 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 713.842,41. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Lanny Jaya dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 25,44%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 24,93% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,51% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 25,01% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,43% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 25,37% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,02 %.

Kabupaten Mamberamo Raya, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp. 408.931,73 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 409.702,04. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Mamberamo Raya dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 29,43%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 28,85% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,59% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 28,93% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 29,35% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,09%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,18 %.

Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp. 515.079,54 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 415.299,48. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Mamberamo Tengah dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 27,11%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 26,57% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,54% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 26,65% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,46% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 27,03% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,08 %.

Kabupaten Mappi, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Mappi sebesar Rp. 604.539,67 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 640.304,36. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Mappi dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 24,95%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 24,46% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,50% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 24,53% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,43% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 24,88% atau tingkat kemiskinan

mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Mappi menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,00 %.

Kabupaten Merauke, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Merauke sebesar Rp. 768.144,14 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.015.426,28. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Merauke dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 22,30%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 21,85% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,45% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 21,92% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,38% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 22,23% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Merauke menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,89 %.

Kabupaten Mimika, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Mimika sebesar Rp. 2.257.509,33 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.294.042,46. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Mimika dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 15,02%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 14,72% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,30% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 14,76% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,26% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 14,97% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,04%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Mimika menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,60 %.

Kabupaten Nabire, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Nabire sebesar Rp. 497.618,37 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 647.763,65. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Nabire dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 26,71%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 26,18% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,53% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 26,25% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,46% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 26,63% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Nabire menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,07 %.

Kabupaten Nduga, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Nabire sebesar Rp. 478.927,26 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 581.153,43. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Nduga dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 27,25%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 26,71% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,54% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 26,79% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,47% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 27,17% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Nduga menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,09 %.

Kabupaten Paniai, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung kabupaten Paniai sebesar Rp. 530.790,61 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 606.529,57. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten Paniai dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 26,21%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 25,69% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,52% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 25,77% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,45% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 26,13% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Paniai menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,05 %.

Kabupaten Pegunungan Bintang, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp. 658.522,22 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 732.307,04. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pegunungan Bintang dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 24,02 %, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 23,54% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,48% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 23,61% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,41% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 23,94% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,96 %.

Kabupaten Puncak, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Puncak sebesar Rp. 555.699,41 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 612.864,88. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Puncak dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 25,78 %, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 25,26% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,52% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 25,34% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,44% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 25,70% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Puncak menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,03 %.

Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp. 472.680,51 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 827.579,25. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Puncak Jaya dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 26,79 %, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 26,26% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,54% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 26,34% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,46% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 26,72% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,07 %.

Kabupaten Sarmi, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 548.637,76 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 467.948,78. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarmi dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 26,32%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 25,79% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,53% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 25,87% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,45% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 26,24% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Sarmi menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,05 %.

Kabupaten Supiori, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Supiori sebesar Rp. 326.224,56 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 320.381,92. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Supiori dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 32,36%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 31,71% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,65% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 31,81% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,55% dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 32,26% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,10%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Supiori menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,29 %.

Kabupaten Tolikara, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Tolikara sebesar Rp. 715.397,73 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 767.469,49. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tolikara dimana

pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 23,26%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 22,79% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,46% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 22,86% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,40 % dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 23,19% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Tolikara menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,93 %.

Kabupaten Waropen, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Waropen sebesar Rp. 381.548,89 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 431.663,91. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Waropen dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 30,07%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 29,47% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,60% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 29,55% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,51 % dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 29,98% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,09%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Waropen menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,20 %.

Kabupaten Yahukimo, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Yahukimo sebesar Rp. 539.746,64 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 970.310,11. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Yahukimo dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 25,32%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 24,82% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,51% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 24,89% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,43 % dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 25,25% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Yahukimo menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,01 %.

Kabupaten Yalimo, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kabupaten Yalimo sebesar Rp. 417.707,69 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 607.989,44. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Yalimo dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 28,52%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 27,95% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,57% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 28,03% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,49 % dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 28,44% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kabupaten Yalimo menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,14 %.

Kota Jayapura, berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa baseline 2021 besaran belanja langsung Kota Jayapura sebesar Rp. 664.132,08 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 660.821,71. Pada skenario kebijakan pertama belanja langsung dan belanja tidak langsung dinaikan masing-masing 5 % maka akan nampak adanya perubahan atau penurunan tingkat kemiskinan di Kota Jayapura dimana pada baseline tingkat kemiskinan yang terjadi sebesar 24,09%, pada skenario pertama tingkat kemiskinan sebesar 23,61% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,48% dari baseline, pada skenario kedua tingkat kemiskinan sebesar 23,68% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,41 % dari baseline, sedangkan pada skenario ketiga tingkat kemiskinan sebesar 24,02% atau tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,07%, maka kesimpulan adalah jika pemerintah Kota Jayapura menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,96 %. Setelah menguraikan simulasi kebijakan untuk kabupaten/kota maka berikut akan disajikan simulasi kebijakan berdasarkan wilayah adat yang ada di Tanah Papua seperti pada tabel berikut :

Tabel 8 Simulasi Kebijakan untuk Wilayah Adat

Wilayah Adat	Skenario Kebijakan				Perubahan dari Baseline (turun %)		
	Baseline	Sken 1	Sken 2	Sken 3	Sken 1	Sken 2	Sken 3
Mamta	27,19	26,65	26,72	27,11	0,54	0,46	0,08
Saereri	29,38	28,8	28,88	29,30	0,59	0,50	0,09
Anim Ha	24,11	23,63	23,7	24,04	0,48	0,41	0,07
La Pago	25,8	25,29	25,36	25,73	0,52	0,44	0,08
Mee Pago	25,48	24,97	25,05	25,41	0,51	0,43	0,08

Berdasarkan tabel 5.37 diatas dapat dijelaskan bahwa jika pemerintah daerah yang berada di wilayah adat Mamta rata-rata menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,08 %. Untuk pemerintah daerah wilayah adat saereri rata-rata menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,18 %. Untuk pemerintah daerah wilayah adat Anim Ha rata-rata menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,96%. Untuk pemerintah daerah wilayah adat La Pago rata-rata menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,04%. Untuk pemerintah daerah wilayah adat Mee Pago rata-rata menaikkan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar 5 % maka akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,02%.

Implikasi Kebijakan

Implikasi Kebijakan Terhadap Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Per Kapita suatu daerah. Ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi langsung, serta program-program pemberdayaan ekonomi lainnya, hal ini secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hubungan antara belanja daerah dan pendapatan per kapita membuka berbagai implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Fokus pada Sektor Prioritas.
 - a. Sektor pertanian dan agroindustri, melalui peningkatan anggaran untuk pembangunan pertanian dan agroindustri;
 - b. Sektor infrastruktur, melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, irigasi, dan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan konektivitas;
 - c. Sektor sosial, melalui pelaksanaan program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial tunai, program keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja.
 - a. Diperlukannya perencanaan daerah yang matang, melalui penyusunan perencanaan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran;
 - b. Pengadaan barang dan jasa yang transparan dan kompetitif untuk menghindari korupsi dan inefisiensi;
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program dan proyek yang telah dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
3. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat.
 - a. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan;
 - b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada.
4. Sinergitas Antar Sektor.
 - a. Koordinasi secara vertikal (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan horisontal (antar institusi daerah) untuk menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran;
 - b. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Implikasi Kebijakan Terhadap Penurunan Kemiskinan

Belanja daerah juga merupakan instrumen yang paling penting dalam upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan. Ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan proyek, hal ini dapat berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat yang kemudian

secara tidak langsung dapat menurunkan kemiskinan. Berikut ini beberapa implikasi kebijakan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan:

1. Fokus pada Program Pengentasan Kemiskinan
 - a. Pemberian bantuan sosial, antara lain :program seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat miskin.
 - b. Pemberdayaan masyarakat, antara lain :program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan akses modal dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
 - c. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, yaitu melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan sanitasi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama di sektor pertanian.
2. Alokasi Anggaran yang Efektif.
 - a. Mengalokasikan anggaran lebih besar pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata;
 - b. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program dan proyek yang telah dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan;
 - c. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan dana digunakan secara efektif.
3. Keterlibatan Masyarakat.
 - a. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan;
 - b. Memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di daerahnya.
4. Kerjasama Antar Sektor
 - a. Meningkatkan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran;
 - b. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Implikasi Kebijakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan belanja daerah merupakan instrumen penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Alokasi anggaran yang tepat dan efektif dalam belanja daerah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian, seperti:

1. Stimulus Ekonomi. Belanja pemerintah, terutama untuk infrastruktur dan proyek-proyek investasi, dapat menjadi stimulus bagi perekonomian. Ketika pemerintah daerah melakukan pengeluaran, permintaan akan barang dan jasa meningkat, yang pada gilirannya mendorong produksi dan menciptakan lapangan kerja baru.
2. Peningkatan Produktivitas. Investasi pemerintah dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang serta jasa. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi.
3. Pertumbuhan Sektor Unggulan. Alokasi anggaran yang fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Misalnya, daerah dengan potensi wisata yang besar dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi, dan pelatihan SDM.
4. Pengurangan Ketimpangan: Belanja daerah yang diarahkan pada pembangunan daerah tertinggal dan pengentasan kemiskinan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan Daya Saing Daerah. Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan lingkungan bisnis, daerah dapat menjadi lebih menarik bagi investor dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional.

Pada dasarnya, belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, serta menurunkan kemiskinan. Dengan merancang kebijakan yang tepat dan melaksanakannya secara efektif, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara langsung sehingga berdampak juga terhadap peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan. Perlu diingat bahwa efektivitas kebijakan belanja daerah sangat tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perilaku sosial masyarakat, ketersediaan sumber daya alam, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Novelty Penelitian

Novelty dalam penelitian ekonomi pada dasarnya merupakan unsur originalitas dari sebuah penelitian. Suatu temuan yang bersifat baru, artinya menemukan apa yang belum di temukan orang lain. Menemukan celah pengetahuan baru, masalah baru dan metode baru dari sekian banyak riset yang telah dilakukan. Novelty di temukan ketika peneliti mencoba menjelajahi fenomena dari permasalahan penelitian. Novelty diperlukan selain untuk mencegah terulangnya hasil yang sama juga mencegah adanya plagiarisme. Menggali lebih jauh tentang fenomena yang sama juga bisa menemukan celah pengetahuan baru.

Secara konseptual novelty terbagai atas 3 (tiga) jenis, yaitu : (1) Kebaruan Tipe I (Invention), yang merupakan hasil penelitian yang baru dan belum ada peneliti lain yang mengerjakannya atau mempublikasikan hasil penelitian yang dikerjakan tersebut; (2) Kebaruan Tipe II (Improvement), yang merupakan improvisasi atau penguatan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada hasil penelitian sebelumnya.; dan (3) Kebaruan Tipe III (Refutation), yang merupakan sanggahan terhadap hasil penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian kali ini, dapat dinyatakan bahwa novelty yang terbentuk merupakan novelty tipe II, yang merupakan penguatan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yang dapat dijelaskan adalah penelitian ini berhasil mengembangkan model kebijakan yang baru dari dampak belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan di suatu daerah, yang disebut Model *Fish Form*.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja langsung, untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja tidak langsung, untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dan untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Berdasarkan analisis dan olah data yang telah dilakukan dengan menggunakan model *Fish Form* dengan metode *2SLS (Two Stage Least Square)*, didapatkan beberapa Kesimpulan antara lain :

1. Belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada 29 kabupaten/kota dimana nilai F-statistik sebesar 193.4117 nilai ini lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,63 dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara variabel atau dengan kata lain bahwa variabel eksogen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel endogen yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,002 < 0,05$), dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota se provinsi Papua didorong untuk meningkatkan belanja langsung sebab variabel eksogen tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota di provinsi Papua.
2. Belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan tingkat probabilitas sebesar $0,2960 > 0,05$ artinya bahwa belanja tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah kabupaten/kota lebih memfokuskan belanja tidak langsung ke belanja Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
3. Pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan dampak nilai total pengaruh -0,1828 dengan probabilitas 0,0000.
4. Pengaruh belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan dampak nilai total pengaruh -0,2232 dengan probabilitas 0,0001.

Daftar Pustaka

- Anderson, R. dan Sundaresan, *Structural Models and Reduced-Form Models in Credit Risk by the Yield ...* PT Gramedia Pustaka Utama. file:///C:/Users/stieportnumbay/Downloads/S3-2016-306883_bibliography.pdf
- Arsyad Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Adisasmita Rahardjo, 2001, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Unhas Makassar
- Badan Pusat Statistik, 2024, *Provinsi Papua Dalam Angka Tahun*, (berbagai tahun penerbitan, BPS Provinsi Papua.
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomis seri sinopsis*, Edisi Pertama, Cetakan keenam, BPFE, Yogyakarta.
- Davey, K.J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, terjemahan, UI-Press.
- Djojohadikusuma S, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Analisis Dampak Belanja...*(Verdi, Mesak, Hasan dan Yundy)

- Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Edy Suandi Hamid, 1999, Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* Vol. XLXV No. 8
- Ekawati, 2001, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Gujarati, D.1999. *Essential of Econometrics*, McGraw-Hill.Inc. Second Edition, London.
- Glasson, J, 1997, *An Introduction to Regional Planning*, London Hutchinson Education
- Halim Abdul, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, cetakan ketiga, Salemba empat, Jakarta.
- Hariadi Pramono, 2008, Jurnal Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.
- Herlambang, T., Sugiarto, Bastoro dan Said K, 2001. *Ekonomi Makro ; Teori Analisis dan Kebijakan*, Gramedia, Jakarta.
- Hyman, David N, 1996, *Public Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy*, The Dryden Press, Harcourt Brace College, Publisher.
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jhingan, ML, 1999, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, diterjemahkan oleh D.Guritno, Edisi ke Tujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jones, BM, 1996, *Local Government Financial Management*, Hertfordshire : ICSA Publishing.
- Kaldor, N, 1970, *The Case for Regional Policies*, Scotitish Journal of Political Economy,
- Kisdarto, 2002, *Capacity Building sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis Bagi Perwujudan Otonomi Daerah Di Indonesia*, PJKA Volume 3 No. 2 Yogyakarta
- Kuznet, S, 1955, *Economic Growth and Inequalities*, American Economic Review
- Lee, Robert D and Ronald W Johnson, 1998, *Public Budgeting System 6th Edition*. AN Asper Publication Gaitherring Maryland.
- Lewis, J.W, 1969, *The Social Limits of Political Charge dalam Modernization by Design*, CH. Morse, e.a, Cornell University Press
- Made Antara, 2006, Jurnal, Dampak Pengeluaran Pemerintah dan Wisatawan terhadap Kinerja Perekonomian Bali.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
- Mankiw, N Gregory, 1997, *Macroeconomics*, Worth Publisher Inc, New York.
- Miller, Stephen M and Frank Russek S. 1997. Fiscal Structure and Economic Growth at the State and Local Level, *Public Finance Review*, Vol. 25 No. 3, 213-237.
- Mudradjad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta, YKPN
- Muhyuddin, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2009, Analisis Korelasi Belanja Publik dan pertumbuhan ekonomi,
- Musgrave, Richard A and Peggy B. Musgrave, 1989, *Public Finance in Theory and Practice*, Mc Graw-Hill
- Myrdal, G, 1957, *Economic Theory and Underdevelopment Regions*, London
- Nicholson, W, 1994. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*, Rajawali Pers.
- Nopirin, 1999. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, BPFE, Yogyakarta.
- Nordhous, 1996, *Analisa Kebijaksanaan Publik*, Penyadur Drs. Mudjahir Darwin, MSc, Cetakan Ketiga, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Prawiro, 1999, *Peranan Pengeluaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Tesis MEP UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Robinson, 2002, *Analisis SWOT Analisis Pengeluaran Pemerintah dengan Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Sukirno Sadono, 2000, *Makroekonomi Modern*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Samuelson, P.A, dan Nordhaus, W, D, 1996. *Makro Ekonomi*, Edisi keempatbelas , alih bahasa Haris Munandar dkk, Erlangga, Jakarta.
- Simandjuntak, DJ Isman, S, 1985, *Persoalan Pokok Sehubungan dengan Hutang Luar Negeri Indonesia*, Seminar di UAJ Yogyakarta
- Singgih Santoso, 2000, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Elex Media Komputindo
- Siti Aisyah T Rahayu, 2000, *Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, Tesis MEP UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
- Sukanto Reksahadiprodjo, 2001, *Kemampuan Aparatur Daerah : Kunci Utama*, Prisma No.12
- Syakhrosa, 2002, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Reksoprayitno, Soediyono, 1997. *Ekonomi Makro : Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Edisi Kelima,

- Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus T.H, 2001, *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
- Todaro, M.P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan, cetakan keempat, Jakarta, Ghalia, Indonesia.